

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu bentuk kesejahteraan yang memungkinkan manusia untuk memiliki derajat hidup yang lebih berkualitas. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Kesehatan, definisi kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan tersebut dapat dicapai melalui suatu upaya kesehatan serta akses ke sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat. Upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat dapat dijalankan pada semua fasilitas kesehatan yang ada. Salah satu fasilitas kesehatan yang dimaksud adalah apotek.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dikelola oleh apoteker, dimana apoteker bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di apotek. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat,

obat tradisional, dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

Pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan dan pembuatan resep, pengemasan sediaan obat, pemberian etiket sediaan, penyerahan sediaan, pemberian informasi tentang cara penggunaan obat dan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pasien, serta melakukan *home pharmacy care* untuk memonitoring efek penggunaan obat pada beberapa pasien penyakit kronis.

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengalami masalah terkait obat (*drug related problem*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*) (Permenkes, 2016).

Apoteker sebagai salah satu tenaga kesehatan yang juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan terapi, harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, bidan, dan sebagainya. Keberadaan apoteker di apotek tidak hanya terkait dengan permasalahan obat, namun apoteker dituntut agar dapat menjalankan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan berinteraksi secara langsung dengan pasien dengan tujuan untuk pemberian informasi obat (PIO), komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), dan konseling bagi pasien yang membutuhkan sehingga mendukung penggunaan obat yang benar dan

rasional. Ketidakhadiran apoteker di apotek dapat menyebabkan standar pelayanan kefarmasian tidak dilaksanakan dengan benar dan akan berpengaruh pada keselamatan pasien dan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat pada kualitas kinerja apoteker.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dominica, Putra, dan Yuliasri (2016) tentang pengaruh kehadiran apoteker terhadap pelayanan kefarmasian di apotek di kota Padang menunjukkan bahwa persentase kehadiran apoteker di apotek di kota Padang masih dikategorikan kurang yaitu sebesar 58,67% dan pelayanan kefarmasian dengan persentase rata-rata sebesar 54,69%. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Novianti (2015) dengan pengambilan sampel yang dilakukan secara sistematis *random sampling* pada 68 apotek di kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 33 apotek dengan kualitas pelayanan buruk di kota Denpasar masih cukup tinggi yaitu (48,5%) dan 35 apotek dengan kualitas pelayanan baik (51,5%).

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Ginting (2009) di kota Medan. Populasi penelitian adalah seluruh apotek di kota Medan dengan 68 responden. Dari data pengelolaan sumber daya manusia diperoleh gambaran persentase kehadiran apoteker secara umum yang tidak hadir setiap hari yaitu sebesar 52,94%. Dari data pelayanan diperoleh 83,82% yang melayani langsung pasien adalah asisten apoteker. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek masih dalam kategori kurang dengan persentase sebesar 42,74%.

Purwanti, dkk (2003) juga pernah melakukan penelitian di Jakarta dengan metode penelitian deskriptif, kemudian data primer diambil dengan cara *crosssectional* dengan menggunakan angket, dimana angket disebar kepada APA di 5 wilayah DKI (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara) pada awal November 2003. Dari penelitian

didapatkan hasil gambaran bahwa frekuensi kehadiran apoteker yang bekerja tidak penuh (1 kali perminggu) yaitu 57,4%.

Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai pengaruh kehadiran apoteker terhadap pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek di Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ende kepulauan Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau Flores merupakan sebuah pulau yang berada diwilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari sembilan kabupaten yang diantaranya adalah Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ende. Pemilihan untuk melakukan penelitian hanya pada tiga kabupaten tersebut karena di Flores salah satu penunjang untuk memiliki kualitas hidup yang baik adalah kesehatan. Pelayanan kesehatan khususnya untuk pelayanan kefarmasian masih tergolong rendah, dan juga penyebaran apotek di kabupaten-kabupaten tersebut belum merata sehingga perlu diperhatikan bagaimana pelaksanaan pelayanan kefarmasian apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Hasil penelitian dari tiga kabupaten ini dapat diasumsikan bisa mewakili mengenai profil Pengaruh Kehadiran Apoteker terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian. Katalog Kabupaten Ngada dalam Angka (2018), menunjukkan jumlah penduduk untuk Kabupaten Ngada pada tahun 2017 adalah 159.081 dengan jumlah kecamatan di Kabupaten Ngada sebanyak 12 kecamatan. Untuk Kabupaten Nagekeo jumlah penduduk yang didapat dari Katalog Nagekeo dalam Angka (2018) sebesar 160.180 terdiri dari 7 kecamatan, dan untuk Kabupaten Ende yang didapat dari Katalog Ende dalam Angka (2019), jumlah penduduk untuk kabupaten ende sebesar 270.201 yang terdiri dari 21 kecamatan. Data yang didapat jumlah dari apotek yang berada di Kabupaten Ngada sebanyak 7 apotek, Kabupaten Nagekeo sebanyak 10 apotek, dan Kabupaten Ende sebanyak 12 apotek.

Dilihat dari penelitian sebelumnya tentang pengaruh tingkat kehadiran apoteker terhadap pelayanan kefarmasian di apotek di beberapa kota masih dikategorikan cukup atau kurang baik dengan skor penilaian cukup (61-80%) dan kurang 20-60% (Kartinah dkk, 2015), maka munculah pertanyaan apakah pengaruh kehadiran apoteker terhadap pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek di Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ende selain itu juga belum dilakukan penelitian mengenai pengaruh kehadiran apoteker terhadap pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh kehadiran apoteker terhadap pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Apotek di Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ende?

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh kehadiran apoteker terhadap pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Apotek di Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ende.

1.3 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah wawasan sekaligus memperoleh pengalaman untuk melakukan penelitian di lapangan mengenai pengaruh kehadiran apoteker terhadap pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Apotek di Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ende.

2. Bagi Apoteker atau IAI (Ikatan Apoteker Indonesia)
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi Apoteker atau IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) dalam meningkatkan kehadiran Apoteker di kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Ende.
3. Bagi Fakultas Farmasi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi masyarakat akademik yaitu para mahasiswa dan dosen, serta dapat dimanfaatkan sebagai gambaran dan sumber informasi untuk dikembangkan menjadi penelitian lanjutan.